



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 596 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN  
BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT PADA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang tercatat di Kartu Inventaris Barang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 2014 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setelah dilakukan penghapusan selanjutnya dilakukan pemindahtanganan dengan cara pelelangan umum akan tetapi mengalami gagal lelang;
- c. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan gedung baru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat/dibukukan dalam Daftar Inventaris Barang sehingga perlu dilakukan pembatalan penghapusan terhadap 21 (dua puluh satu) bangunan gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Unit pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membatalkan penghapusan barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1068 Tahun 2014 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembukuan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Daftar Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 596 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBATALAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN  
BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH  
SATU) UNIT PADA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	Unit Pemakai	Surat Usulan Penghapusan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0001	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0002	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0004	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
4	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0001	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
5	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0002	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0003	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
7	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0004	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
8	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0006	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
9	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0007	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
10	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0008	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
11	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0009	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
12	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0010	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
13	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0011	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
14	Rumah Negara Galangan III Type B Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.02.03.04	0012	1976	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
15	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah Lain-lain	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.12.01.05.04	0001	1986	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0003	1993	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0006	2011	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0007	2011	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	0005	2012	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	-	2012	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	03.11.01.01.01	-	2012	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Nomor 268/-076.7 tanggal 11 Februari 2014

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

